

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adolp Hualo, 2002, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Arifin, Firmansyah, dkk, 2005, *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara*, KRHN bekerjasama dengan Mahkamah Konstitusi didukung oleh *The Asia Foundation* dan USAID, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2015, *Konstitusi Bernegara Praksis Kenegaraan Bermartabat dan Demokratis*, Malang: Setara Press.
- Atmasasmita, Romli, 2000, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indoensia, Jakarta.
- Budiardjo, Miriam, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Drumbl, Mark A., 2017, *Atrocity, Punishment, and International Law Chapter 1: Extraordinary Crime and Ordinary Punishment: An Overview*. Cambridge University Press.
- Effendy, Marwan, 2005, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- El-Muhtaj, Majda, 2012, *Hak Asasi Manusia dalam Kontitusi Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Gozali, Djoni Sumardi, 2020, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum (Civil Law, Common Law, dan Hukum Adat)*, Nusa Media, Bandung.
- Hiariej, Eddy O.S., *Pengadilan atas Beberapa Kejahatan Serius terhadap HAM*, Erlangga, Jakarta.
- HR, Ridwan, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, PT Rajagrafindo Persada, Depok.
- Huda, Ni'matul, 2007, *Lembaga Negara Masa Transisi Menuju Demokrasi*, UII Press, Yogyakarta.
- Isharyanto, 2016, *Hukum Kelembagaan Negara*, Deepublish, Yogyakarta.
- Komnas HAM, 2013, *Komentar Umum Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik, Konvenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Komnas HAM, Jakarta.
- Lukito, Ratno, 2022, *Perbandingan Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Mahrus, Ali, 2011, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat: In Court System & Out Court System*, Gramata Publishing, Depok.
- M. Yahya Harahap, 1998, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Pustaka Kartini.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Matompo, Osgar S., 2018, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Intrans Publishing, Malang.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2022, *Penelitian Hukum*, Prenandamedia Group, Jakarta.
- Mochtar, Zainal Arifin, 2016, *Lembaga Negara Independen, Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amendemen Konstitusi*, PT Raja Grafindo Persada, Depok.
- R. Wiyono, 2006, *Pengadilan HAM di Indonesia*, Jakarta: Kencana.

- Radjab, Syamsuddin, 2018, *Politik Hukum Pengadilan HAM di Indonesia*, Nagamedia, Jakarta.
- Rhona, Christian, dkk, 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soemardjono, Maria. S.W., 2019, *Metodelogi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Sujatmoko, Andrey, 2015, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sularto, RB, 2018, *Pengadilan HAM (Ad Hoc) Telaah Kelembagaan dan Kebijakan Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Utami, Penny Naluria, dkk, 2021, *Jalan Menuju Keadilan Korban Pelanggaran HAM yang Berat*, Balitbangkumham Press, Jakarta.

### **Jurnal/ Laporan/ Artikel**

- Adriaan Bedner, 2010, *An Elementary Approach to The Rule of Law*.
- Ahmad Basarah, “Kajian Teoritis Terhadap Auxiliary State’s Organ Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia”, *Jurnal MMH* Jilid 43 No 1 Januari 2014.
- Alan Watsons, “Comparative Law and Legal Change”, *The Cambridge Law Journal* Vol. 37 No 2.
- Alkostar, Artidjo, 2013, “Korupsi sebagai Extra Ordinary Crime”, Makalah dalam Training Pengarustamaan Pendekatan Hak Asasi Manusia dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia bagi Hakim Seluruh Indonesia.
- Anna Triningsih dan Nuzul Qur’aini Mardiya, “Interpretasi Lembaga Negara dan Sengketa Lembaga Negara dalam Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara”, *Jurnal Konstitusi* Volume 14 Nomor 4, Desember 2017.
- Asep Mulyana, *Perkembangan Pemikiran HAM*, Jakarta: Elsam.
- A. Yuliatiningsih, Penerapan Asas Pacta Tertius Nec Nocent Nec Prosunt Berkaitan dengan Statuts Hukum Daerah Dasar Laut Samudra Dalam (Sea Bed), *Jurnal Dinamika Hukum* Volume 10 (1) 2010.
- Choky R. Ramadhan, “Konvergensi Civil Law dan Common Law di Indonesia dalam Penemuan dan Pembentukan Hukum”, *Jurnal Mimbar Hukum* Volume 30, Nomor 2, Juni 2018.
- Febriansyah Ramadhan, dkk, Penataan Ulang Kewenangan Penyidikan dan Penuntutan dalam Penegakan Hukum Pelanggaran HAM Berat, *Jurnal VeJ* Volume 6, Nomor 1 Tahun 2020.
- Harry Purwanto, *Persoalan di Sekitar Pelanggaran HAM yang Berat di Indonesia*, Jurnal Mimbar Hukum.
- Herlambang P. Wiratraman, 2008, *Hukum Acara Peradilan HAM: Pengantar*.  
\_\_\_\_\_, Akses Keadilan Bagi Korban Pelanggaran HAM Berat Pasca Putusan MK, *Jurnal Rechtsvinding* Volume 2 Nomor 2, Agustus 2013.
- International Criminal Court, 2020, *Understanding the International Criminal Court*.

- Jefri Porkonanta Tarigan, “Akomodasi Politik Hukum di Indonesia terhadap Hak Asasi Manusia Berdasarkan Generasi Pemikirannya”, *Jurnal Konstitusi* Volume 14 Nomor 1 Maret 2017.
- Komnas HAM, 2020, *Laporan Tahunan Komnas HAM Tahun 2019*, Komnas HAM, Jakarta.
- Komnas HAM, 2021, *Laporan Tahunan Komnas HAM Tahun 2020*, Komnas HAM, Jakarta.
- Komnas HAM, 2022, *Laporan Tahunan Komnas HAM Tahun 2021*, Komnas HAM, Jakarta.
- Kontras, 2020, *Catatan Kritis 20 Tahun Penerapan UU Pengadilan HAM (2000-2020): Mengkaji UU Pengadilan HAM yang Efektif*.
- Mukhlis, “Kewenangan Lembaga-Lembaga Negara dalam Memutuskan dan Menafsirkan UUD Setelah Amandemen Keempat Undang-Undang Dasar 1945”, *Jurnal Syiar Hukum* Volume XIII Nomor 1 Maret 2011.
- Muladi, 2007, *Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara XI, Mekanisme Domestik untuk Mengadili Pelanggaran HAM Berat Melalui Sistem Pengadilan atas Dasar UU No. 26 Tahun 2000*, Elsam, Jakarta.
- Novianto M. Hantoro, “Klasifikasi Jabatan dalam Kelembagaan Negara: Permasalahan Kategori Pejabat Negara”, *Jurnal Negara Hukum* Volume 7 Nomor 2, November 2016.
- Nurrahman Aji Utomo, Dekonstruksi Kewenangan Investigatif dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, *Jurnal Konstitusi* Volume 16 Nomor 4 Desember 2019.
- Oly Viana Agustine, dkk, Politik Hukum Penguatan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan, *Jurnal Konstitusi* Volume 16 Nomor 2, Juni 2019.
- Riri Delany, Diah Apriani Atika Sari, Investigasi Proprio Motu Terhadap Pelanggaran Hukum Perang Pada Konflik Israel Palestina Dalam Operation protective Edge, *Jurnal Belli Ac Pacis*. Vol. 3. No.1 Juni 2017.
- Sahid Hadi, Merumuskan Peran Dominus Litis pada Komnas HAM, *Jurnal Peradilan Indonesia Teropong*, Volume 7 Juli-Desember 2019.
- United Nations, 2010, *Guidance Note on The Secretary-General, United Nations Approach to Transitional Justice*.
- Wahyono Darmabrata, “Perbandingan Hukum dan Pendidikan Hukum”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Nomor 4 Tahun 2000.
- Yeni Handayani, 2014, *Pengaturan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia dan Konstitusi Amerika Serikat*, [https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal\\_online/PENGATURAN%20HAM%20DALAM%20KONSTITUSI%20INDONESIA%20DAN%20AS.pdf](https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/PENGATURAN%20HAM%20DALAM%20KONSTITUSI%20INDONESIA%20DAN%20AS.pdf), diakses pada 08 Maret 2023, pukul 11.34 WIB.

### **Skripsi/ Tesis/ Disertasi**

- Adya Sepasthika, 2018, *Tujuan Pembentukan Pengadilan Internasional, Studi Kasus: Special Tribunal for Lebanon*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.

Samuel Saut Martua Samosir, 2019, *Konsep Penyatuan Penyelidikan dan Penyidikan dalam Tindak Pidana Pelanggaran Berat HAM*, Disertasi Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

*Rome Statute of International Criminal Court 1998* (Statuta Roma 1998)

*Rule of Procedure and Evidence* (RoPE)

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 75/PUU-XIII/2015

Risalah Sidang Perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 75/PUU-XIII/2015

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-XVII/2019

Peraturan Jaksa Agung Nomor PERJA-039/A/JA/10/2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus

### **Internet**

Anonim, *The Presidency*, <https://www.icc-cpi.int/about/presidency> diakses pada 5 Januari 2023 pukul 16.36 WIB.

<https://raninuraeni379.wordpress.com/s-i-h/hukum-dan-ham/2-proses-acara-peradilan-ham/>, diakses pada 8 Januari 2023 pukul 20.24 WIB.

SKP HAM-Sulteng, *Ringkasan Eksekutif Laporan dan Rekomendasi Tim PPHAM*, <https://skp-ham.org/3388/ringkasan-eksekutif-laporan-dan-rekomendasi-tim-ppham/> diakses pada 25 Januari 2023 pukul 21.08 WIB.